



PELIBATAN TENTARA NASIONAL INDONESIA DALAM MENANGANI SEPARATIS DI PAPUA

*THE INVOLVEMENT OF THE INDONESIAN NATIONAL ARMY IN ADDRESSING
SEPARATISTS IN PAPUA*

Ganiahardi, Sri Sundari, Thomas Gabriel
Prodi Strategi dan Kampanye Militer, FSP, Unhan RI
gania.hardi@yahoo.co.id

Abstract. *The Papuan conflict began in 1961 when the Dutch wanted to form the state of West Papua. The distorting of facts from some Papuan figures against the New York agreement of 1963, made the milestone of the birth of separatist ideas to secede from the Republic of Indonesia. Unresolved cases of human rights violations, and increasing feeling marginalized and discriminated among Papuans add to the long line of problems in Papua to date. The problem of welfare and security stability in Papua has not been resolved well enough, although the government has made various efforts by involving all relevant stakeholders. Especially when the government changed the label of KKB Papua to a Papuan Separatist terrorism group (KSTP), making security stability in Papua more dynamic. On the one hand, the Papuan people have not been formed and built to form an area defense that causes obstacles for TNI/Polri units in handling these KSTP cases, so there is a need for an integrated territorial operation that can involve all relevant stakeholders in Papua. The purpose of this study is to determine the involvement of Papuan figures, territorial development strategies and indicators of the success of territorial operations in order to improve welfare and security stability in Papua. The method used in this study uses phenomenological qualitative research methods to uncover a phenomenon based on the consciousness of several individuals. The results of this study can be concluded that there is a need for a policy to appoint all Papuan figures as ambassadors/cadres who can collaborate with the government in improving welfare and maintaining security stability in Papua. So that territorial operations carried out by the TNI will continue to be based on local culture or wisdom in Papua itself.*

Keywords: *Security, Welfare, Engagement, Papua, TNI, Terrorism.*

Abstrak. Konflik Papua diawali pada tahun 1961 ketika Belanda berkeinginan membentuk negara Papua Barat. Adanya pemutarbalikan fakta dari sebagian tokoh Papua terhadap perjanjian New York tahun 1963, menjadikan tonggak lahirnya ide-ide separatis untuk memisahkan diri dari NKRI. Kasus pelanggaran HAM yang tidak kunjung terselesaikan, rasa termarginalisasi serta rasa terdiskriminasi orang Papua menambah deretan panjang permasalahan di Papua sampai dengan saat ini. Permasalahan kesejahteraan dan stabilitas keamanan di Papua sampai belum dapat diselesaikan dengan cukup baik, walaupun pemerintah telah melakukan berbagai upaya dengan melibatkan seluruh stakeholder terkait. Terlebih ketika pemerintah mengganti label KKB Papua menjadi Kelompok Separatis



Separatis Papua (KSTP), membuat stabilitas keamanan di Papua menjadi lebih dinamis. Di satu sisi masyarakat Papua belum terbentuk dan terbina untuk membentuk suatu pertahanan wilayah yang mengakibatkan kendala bagi satuan-satuan TNI/Polri dalam menangani kasus-kasus KSTP ini, sehingga diperlukannya operasi teritorial terpadu yang dapat melibatkan seluruh stakeholder terkait di Papua. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelibatan tokoh-tokoh Papua, strategi pembinaan teritorial dan adanya indikator keberhasilan operasi teritorial dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan stabilitas keamanan di Papua. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi untuk mengungkap suatu fenomena yang didasarkan oleh kesadaran dari beberapa individu. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan perlu adanya suatu kebijakan untuk mengangkat seluruh tokoh Papua sebagai duta/kader yang dapat berkolaborasi dengan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan menjaga stabilitas keamanan di Papua. Sehingga operasi teritorial yang dilaksanakan oleh TNI akan terus berpijak terhadap kultur atau kearifan lokal di Papua itu sendiri.

Kata Kunci : Keamanan, Kesejahteraan, Pelibatan, Papua, TNI, Separatis.

1. Latar Belakang.

Stabilitas keamanan negara tidak terlepas dari keterkaitan antara geografi, demografi, Sumber Kekayaan Alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya serta pertahanan dan keamanan, yang saling berkaitan, mempengaruhi, berinteraksi, dan berkaitan sehingga membentuk suatu sistem yang utuh dan dapat diperhitungkan untuk menentukan arah tujuan nasional. Salah satu aspek stabilitas keamanan negara adalah pertahanan dan keamanan, pemerintah selaku penanggung jawab negara wajib menciptakan kondisi pertahanan dan keamanan negara yang baik untuk melindungi segenap warga negara dalam menjalankan pembangunan nasional. TNI sebagai lembaga pertahanan negara sesuai amanat UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI, dan Polri sebagai lembaga keamanan negara sesuai amanat UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia merupakan ujung tombak bagi pemerintah dalam mewujudkan Pertahanan dan Keamanan negara dalam rangka mewujudkan Stabilitas Keamanan negara.

Permasalahan pertahanan keamanan nasional dewasa ini terjadi sangat kompleks di mana permasalahan keamanan tidak hanya didominasi oleh aspek kekerasan namun lebih jauh menyentuh aspek ideologi negara yang mengancam disintegrasi bangsa, salah satu



permasalahan pertahanan keamanan negara yang belum terselesaikan hingga saat ini adalah stabilitas keamanan di wilayah Papua di mana terdapat kelompok separatis Papua yang menjadi ancaman disintegrasi bangsa. Kompleksnya penanganan kelompok separatis Papua yang telah dilaksanakan selama ini tidak hanya membutuhkan operasi penegakan hukum dengan melaksanakan intimidasi bagi kelompok separatis Papua, namun diperlukan Operasi teritorial yang mana tujuan dari operasi teritorial adalah membentuk RAK (Ruang Alat dan Kondisi Juang) masyarakat Papua untuk mewujudkan situasi keamanan wilayah Papua yang akan berdampak langsung pada stabilitas keamanan negara.

Fenomena yang terjadi adalah kondisi Papua semenjak kembali menjadi bagian dari NKRI terus mengalami pasang surut dalam hubungannya dengan pemerintah pusat terutama terhadap tuntutan keabsahan dan legalitas hukum Pepera serta keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI. Hal ini merupakan suatu ancaman disintegrasi bangsa yang perlu mendapatkan perhatian dan penanganan secara serius, jitu serta komprehensif, karena Papua memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Ketika daerah-daerah lain merdeka dan berdaulat dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) pada 17 Agustus 1945, Papua yang merupakan daerah jajahan Belanda, tidak diserahkan oleh Belanda kepada Indonesia. Papua baru dilepas oleh Belanda dan bergabung kedalam NKRI pada 1 Mei 1963 dan harus dilanjutkan lewat Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada tahun 1969. Walaupun telah ada pengakuan dunia Internasional secara resmi mengenai Papua sebagai bagian integral dari NKRI, ternyata dalam kenyataannya ancaman keamanan di Papua masih belum terselesaikan, bahkan kegiatan dari Separatis Papua cenderung semakin meningkat. Aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua telah menimbulkan rasa ketakutan bagi masyarakat, bukan saja masyarakat pendatang tetapi Orang Asli Papua (OAP) sendiri. Kelompok Separatis Teroris (KST) Papua telah meninggalkan banyak “jejak luka” bagi Papua, mereka kerap menebarkan teror dan merusak fasilitas umum hingga memakan korban jiwa. Mereka juga tidak segan menyerang aparat keamanan dengan senjata yang dimiliki. Data awal yang diperoleh dari Kantor Staf Kepresidenan, KST Papua sampai dengan Maret 2022 telah



melakukan tindak kekerasan dengan 13 korban meninggal dunia dan 5 korban mengalami luka-luka yang mencakup Anggota TNI dan masyarakat sipil (news.detik.com, 2022). Bahkan pada tanggal 31 Desember 2022 lalu, KST telah melakukan penyerangan terhadap Polres Yahukimo dan Pos Brimob (news.detik.com, 2022)

Dihadapkan kepada berbagai peristiwa di atas, dalam rangka mendukung tugas TNI untuk mengatasi konflik di Papua, Kodam XVII/Cenderawasih telah menggelar berbagai operasi dengan menitik beratkan kepada sektor keamanan dan kesejahteraan masyarakat dalam rangka membantu Polri maupun pemerintah daerah. Namun, sampai dengan saat ini konflik di Papua belum dapat terselesaikan secara komprehensif. Kondisi obyektif yang berkembang di Papua adalah belum terwujudnya kondisi stabilitas keamanan akibat dari belum tuntasnya penanganan kelompok separatis Papua. Dalam menangani kelompok separatis Papua, berdasarkan STR Panglima TNI No. 1164/2021 yang memerintahkan mengorganisir seluruh satgas menjadi satgas Kodim, satgas Koramil, satgas Lanal dan satgas Lanud dengan tugas pokok melaksanakan tugas dan fungsi organik dengan titik berat melaksanakan pembinaan teritorial, binpotmar, binpotdirga dan komunikasi sosial.

Belum optimalnya kemampuan satuan teritorial dalam satgas penanganan separatis di Papua berdampak pada masih eksisnya kelompok separatis di tengah masyarakat, kondisi masyarakat yang belum terbentuk dan terbina dalam membentuk suatu pertahanan wilayah mengakibatkan kendala bagi satuan tugas penanganan separatis Papua dikarenakan dukungan masyarakat masih lemah terhadap penyelesaian separatis Papua, beberapa persoalan yang terjadi dalam belum tercapainya tujuan operasi Teritorial di wilayah Papua yang berhasil diidentifikasi oleh penulis antara lain : Persoalan Pertama, belum kuatnya pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam pelaksanaan operasi teritorial di wilayah Papua, di mana masyarakat Papua yang dikenal selama ini sebagai masyarakat tradisional yang memiliki kepatuhan masyarakat pada tokoh adat dan tokoh agama lebih tinggi dibandingkan dengan kepatuhan terhadap aparat negara. Kedua, belum adanya strategi yang tepat dalam pendekatan pembinaan teritorial di wilayah Papua, di mana selama ini strategi pendekatan yang dilaksanakan melalui doktrin teritorial Angkatan Darat



yang berlaku untuk umum untuk seluruh wilayah di Indonesia, namun kekhasan wilayah Papua menjadikan perbedaan dengan masyarakat lainnya sehingga diperlukan suatu doktrin khusus dalam penanganan masyarakat Papua. Ketiga, belum adanya indikator yang kuat sebagai pedoman aparat teritorial dalam menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan operasi teritorial di wilayah Papua sehingga pada pelaksanaan operasi selama ini hanya sebatas menjalankan tugas tanpa ada tujuan yang jelas (Halkis, 2020).

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka perlunya suatu solusi yang mampu menyelesaikan setiap persoalan yang terjadi pada penanganan Separatis Papua, diperlukan suatu kebijakan yang dapat mengintegrasikan seluruh instansi yang terlibat dan elemen-elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan stabilitas keamanan dan kesejahteraan di Papua. Stabilitas keamanan di wilayah Papua diperlukan untuk mewujudkan pembangunan nasional dimana pembangunan nasional merupakan usaha pemerintah dalam mewujudkan kemajuan hidup berbangsa dan bernegara sesuai dengan amanat UUD 1945 yang termaktub dalam alinea keempat dimana tujuan nasional meliputi “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”. Maka dari sebab itu, tidak berlebihan apabila peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian tentang pelibatan TNI dalam menangani separatis guna mewujudkan stabilitas keamanan dan kesejahteraan di Papua.

2. Metodologi Penelitian.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Metode kualitatif merupakan penelitian yang membantu manusia memahami fenomena yang terjadi disekitarnya. Creswell membagi pendekatan penelitian menjadi dua yaitu kuantitatif dan kualitatif. Berdasarkan pendapat Creswell tersebut, metode penelitian kualitatif dapat dikatakan sebagai suatu proses pemahaman akan suatu permasalahan manusia atau sosial berdasarkan gambaran holistik lengkap yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan



pandangan informan secara terperinci dan disusun dalam sebuah latar alamiah (Creswell, 2009, p.293). Dengan berdasarkan pendapat tersebut, maka penelitian ini didesain untuk mendapatkan pemahaman terhadap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, yang selanjutnya melalui proses-proses analisis akan menghasilkan *outcome*.

Ketika merancang sebuah penelitian dan menafsirkan data, dalam pendekatan fenomenologi, peneliti tidak memposisikan teori dalam posisi sentral. Teori yang ada digunakan untuk menganalisis ketika peneliti turun ke lapangan dan untuk memverifikasi semua data yang ditemukan.

3. Pembahasan.

Fakta menunjukkan bahwa kondisi objektif keamanan yang berkembang di Papua adalah masih adanya tindak kekerasan bersenjata yang terjadi dan belum tertangani dengan baik oleh aparat keamanan maupun komponen masyarakat lokal. Untuk mengatasi situasi keamanan yang sedang berkembang di Papua, operasi teritorial diharapkan menjadi solusi dalam kebuntuan setiap upaya yang dilaksanakan selama ini, dengan terbentuknya kemanunggalan TNI-Rakyat di wilayah Papua dapat membentuk suatu pertahanan semesta yang dibangun oleh unsur TNI bersama-sama dengan rakyat dalam menghadapi kelompok separatis Papua. Selain hal itu, masih terjadi penegakan hukum yang belum berjalan dengan baik, dan meningkatnya tindakan provokasi yang dilakukan oleh kelompok separatis bersenjata. Kondisi keamanan di Papua mengalami pasang surut, namun secara umum relatif kondusif, kecuali beberapa daerah masih memiliki tingkat kerawanan yang cukup tinggi, terutama daerah yang menjadi basis kekuatan kelompok teroris bersenjata khususnya wilayah Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Nduga, Kabupaten Intan Jaya, Kabupaten Mimika dan Kabupaten Paniai. Daerah-daerah ini merupakan basis kekuatan dan kegiatan kelompok separatis bersenjata, di samping di wilayah perbatasan. Gangguan keamanan biasanya cenderung meningkat pada even-even yang menguntungkan mereka, seperti saat Pemilu, hari Proklamasi Kemerdekaan RI atau hari Kemerdekaan Papua Barat tanggal 1 Desember dan hari-hari besar yang diakui oleh Dunia Internasional seperti hari HAM.



Gangguan keamanan dapat berwujud demonstrasi yang cenderung anarkis di wilayah perkotaan untuk memancing aparat keamanan agar bertindak di luar batas kepatutan atau berwujud penyerangan yang dilakukan oleh kelompok teroris bersenjata yang bergerak dari basis-basis mereka di sekitar perbatasan RI-PNG maupun kelompok yang berbasis di daerah pedalaman dengan sasaran instansi militer, pos-pos TNI/Polri yang terpencil atau lengah.

Operasi teritorial TNI dapat terlaksana secara menyeluruh sehingga membentuk sebuah Ruang Alat Juang yang tangguh. Satgas teritorial menjalankan fungsi teritorial kewilayahan secara rutin melalui gelar operasi rutin masing-masing secara terbatas. Satgas teritorial yang ditugaskan oleh TNI harus memiliki sasaran tugas yang dapat digabungkan dengan adanya satgas penindak terorrisme. Penyelenggaraan operasi teritorial dilakukan dengan perencanaan yang bersifat gabungan dan memerlukan kemampuan teritorial yang khusus (zeni, kesehatan, bintal dan lain-lain) dan lebih dari kemampuan normal mengingat medan dan karakter masyarakat yang dihadapi sangat khas. Sasaran suatu teritorial tidak hanya berupa fisik saja namun juga non fisik, oleh karenanya harapan dan konsep kedepan adalah: Masyarakat dapat menikmati pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah melalui instansi terkait atau TNI, dengan demikian hati masyarakat Papua akan kuat terhadap Pemerintah Indonesia.

Upaya kelompok teroris OPM yang mempengaruhi masyarakat untuk turut berjuang untuk kemerdekaan Papua akan berbalik arah memburu keberadaan kelompok teroris OPM, melibatkan peran serta Orang Asli Papua (OAP) dalam berbagai proyek pembangunan guna mencapai pemerataan kesejahteraan di wilayah Papua. Di sisi lain mereka akan turut merasakan kontribusi pembangunan dan membangun kebanggaan terhadap daerah nya sendiri, melibatkan todat, tomas, toga dalam setiap kegiatan, contoh: sosial, penyelesaian masalah, keagamaan dan lain-lain, mengedepankan kearifan lokal dalam segala aspek pembangunan, memprioritaskan OAP sebagai putra daerah dalam semua proses rekrutmen PNS, TNI, karyawan dengan telah diseleksi sesuai prasyarat yang ditentukan, merefleksikan kehadiran negara di setiap lini kehidupan masyarakat Papua mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, budaya dan hankam. Untuk menemukan kondisi tersebut,



melalui analisis dengan menggunakan Teori penanganan Separatis "*European Convention on The Suppression of Terrorism (ECST)*", Teori Manajemen "George R. Terry", teori keamanan nasional "Letjen TNI Bambang Darmono" dan Teori Fishbone "Ishikawa", dihadapkan pada trend ancaman separatis Papua, TNI sudah seharusnya meningkatkan kemampuan satgas teritorial yang handal agar mampu mendukung Tupok TNI pada periode pembangunan saat ini juga (2020-2024) secara bertahap, bertingkat dan berlanjut sesuai dengan teori fungsi manajemen (*Planing, Organizing, Actuatuning, Controlling*) yang dikemukakan George R. Terry. Adapun kondisi yang diharapkan pada perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam peningkatan kemampuan satgas teritorial sebagaimana berikut ini.

4.6.1 Pelibatan tokoh adat dan tokoh agama dalam pelaksanaan operasi teritorial di wilayah Papua. Untuk menganalisa terkait dengan subfokus ini tidak terlepas dari proses perencanaan dan pengorganisasian Satgaster dalam memberdayakan orang asli Papua (OAP) untuk mendukung pelaksanaan operasi teritorial.

a. Perencanaan Satgas Teritorial (*Planning*). Berdasarkan teori manajemen Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa perencanaan adalah pemilihan fakta (Sasaran) dan penghubungan fakta-fakta serta pembuatan dan penggunaan perkiraan-perkiraan atau asumsi-asumsi untuk masa yang akan datang (strategi) dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Tujuan). Tujuan yang dimaksud adalah meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang menjadi suatu pilihan dalam hidup sebagai sebuah kebahagiaan melalui kebijakan-kebijakan dari pemerintah. Sebagaimana menurut pendapat Bentham (1748-1832) kesejahteraan merupakan salah satu *grand theory* untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizens*. Bentham menggunakan istilah "*utility*" (kegunaan) untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang



dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk.

Hal tersebut merupakan langkah penting dalam menentukan suatu manajemen yang baik bagi peningkatan kemampuan satgas teritorial dalam mewujudkan keberhasilan tugas di Papua, mencapai hal-hal yang diharapkan :

- 1) terbentuknya suatu kemandirian TNI-Rakyat yang terbentuk dengan hati, melebur menjadi satu komunitas di tengah masyarakat, di wilayah Papua, sehingga terbentuknya suatu kondisi wilayah pertahanan yang kuat; Satgas teritorial memiliki kemampuan menciptakan inovasi dalam pelaksanaan operasi teritorial dalam merebut hati masyarakat Papua untuk setia terhadap NKRI serta menimbulkan rasa nasionalisme yang kuat untuk dapat digunakan dalam menyelesaikan permasalahan separatist Papua. Berbagai macam inovasi dilaksanakan untuk dapat menggugah perasaan masyarakat Papua dalam memiliki jiwa nasionalisme terhadap NKRI;
- 2) Satgas teritorial menjadi barisan terdepan bagi Pemerintah agar dapat memanfaatkan operasi teritorial secara terpadu untuk penyelesaian kelompok separatist OPM tanpa melalui penggunaan kekuatan bersenjata. Tugas ini melibatkan masyarakat yang telah berpihak kepada Indonesia /TNI dalam menemukan jaringan separatist OPM di tengah masyarakat yang telah berhasil menyusup ke semua lini termasuk di pemerintahan daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

b. Pengorganisasian Satgas teritorial (*Organizing*). Berdasarkan teori manajemen Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa pengorganisasian merupakan penentuan, pengelompokan, dan penyusunan macam-macam kegiatan yang diperlukan untuk mencapai tujuan (Cara Bertindak), penempatan orang-orang (personel), terhadap kegiatan-kegiatan ini, penyediaan faktor-faktor fisik yang cocok bagi keperluan kerja (Infrastruktur dan Sarpras) dan penunjukkan hubungan wewenang (Struktur Organisasi), yang dilimpahkan terhadap setiap orang dalam hubungannya dengan pelaksanaan setiap kegiatan yang diharapkan;



- 1) pelaksanaan operasi teritorial bersama dengan Tokoh adat dan tokoh agama ini diharapkan mendapatkan suatu kesan di tengah masyarakat bahwa operasi teritorial merupakan kebutuhan setiap warga Papua. Dengan penggunaan Cara Bertindak yang kuat dan tepat dalam memanfaatkan pendekatan kultural di mana permasalahan separatis Papua memang pelik dan perlu ada formula yang tepat untuk mengatasinya. Kultur masyarakat Papua yang lebih mematuhi hukum adat dibandingkan dengan mematuhi hukum formal yang berlaku (Undang-undang) sedikit demi sedikit dibina untuk secara bersama-sama mematuhi hukum formal melalui pemanfaatan pengaruh tokoh adat dan tokoh agama dengan bersama-sama menghormati pengaruh tokoh pemerintahan yang mengelola wilayah Papua, diperlukan pendekatan yang baik kepada tokoh adat dan tokoh agama untuk mendistribusikan pesan-pesan dalam membangun suatu pembinaan wilayah pertahanan dan mewujudkan kemandirian TNI-Rakyat;
- 2) Kebijakan Mabes TNI dalam pelaksanaan *rolling* aparat teritorial diharapkan menambah aspek penyelesaian tugas sebelum aparat teritorial dilaksanakan pergantian agar pelaksanaan operasi teritorial berjalan efektif dan efisien. Penyeragaman pendekatan dan cara bertindak aparat teritorial yang baru diharapkan dapat meneruskan pendekatan yang dilaksanakan oleh aparat teritorial yang telah digantikan;
- 3) Peningkatan sarana dan prasarana serta Infrastruktur melalui kegiatan bhakti TNI bersama rakyat semakin meningkat dengan adanya rasa saling membutuhkan dalam pengadaan sarana dan prasarana serta infrastruktur bagi masyarakat maupun bagi aparat teritorial TNI;
- 4) Struktur Organisasi Satgas teritorial. Terbentuknya struktur organisasi yang seimbang dengan luas wilayah Papua terutama dalam penempatan markas-markas pembinaan teritorial TNI, melalui penambahan Kodim-Kodim serta Koramil yang dapat lebih mendekatkan diri antara TNI dengan Rakyat. Pembentukan struktur organisasi yang tepat akan meningkatkan keberhasilan tugas satgas teritorial yang



lebih baik dengan pembentukan yang ideal akan dapat melaksanakan pembinaan masyarakat secara optimal.

Strategi yang tepat dalam pendekatan pembinaan teritorial di wilayah Papua. Sebagaimana telah dijelaskan diatas, strategi yang dimaksud dalam subfokus ini tidak terlepas dari proses pelaksanaan (*actuating*) operasi melalui pendekatan pembinaan teritorial. Berdasarkan teori manajemen Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa Pelaksanaan/Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar supaya berkehendak dan berusaha dengan keras untuk mencapai tujuan dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian dari pihak pimpinan. Kondisi yang diharapkan dalam pelaksanaan satgas teritorial dihadapkan pada teori penanganan Separatis menurut *European Convention on The Suppression of Terrorism (ECST)* tahun 1977 di Eropa, makna separatis mengalami pergeseran dan perluasan paradigma, yaitu sebagai suatu perbuatan yang semula dikategorikan sebagai *crimes against state* (termasuk pembunuhan dan percobaan pembunuhan kepala negara atau anggota keluarganya), menjadi *crimes against humanity*, dimana yang menjadi korban adalah masyarakat sipil. Sedangkan *crimes against humanity* itu sendiri termasuk ke dalam kategori *gross violation of human rights* (pelanggaran HAM berat) yang dilakukan sebagai bagian yang meluas/sistematik, yang diketahui bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, lebih diarahkan pada jiwa-jiwa orang tidak bersalah (*public by innocent*), sebagaimana terjadi di Bali (bohn.g.id, 2022).

Hal yang diharapkan dalam operasi teritorial pada penanganan separatis adalah sebagai berikut : a. Pembinaan ketahanan wilayah. Terwujudnya suatu ruang, alat dan kondisi juang (RAK) yang tangguh yang dilaksanakan terus-menerus secara efektif dan efisien untuk memperbaiki/ menyempurnakan pembinaan perlawanan wilayah melalui perencanaan, penyiapan, pengerahan dan pengendalian dalam rangka menciptakan, memelihara dan meningkatkan daya tangkal terhadap segala bentuk ancaman baik yang datang dari dalam maupun dari luar negeri melalui Pembinaan ketahanan wilayah; b.



Pembinaan Komunikasi Sosial. Terwujudnya suatu pembinaan komunikasi sosial yang merupakan pembinaan terhadap suatu kegiatan komunikasi yang dilaksanakan terus menerus secara efektif dan efisien untuk memperbaiki/menyempurnakan Komsos dapat digunakan sebagai media sosialisasi, media penyamaan visi, misi dan interpretasi media koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta sebagai sarana untuk meningkatkan, memelihara dan memantapkan kemandirian TNI dan Rakyat dalam rangka mendukung tercapainya tugas pokok TNI; dan c. Bhakti TNI. Terwujudnya Pembinaan Bhakti TNI yang merupakan pembinaan terhadap suatu kegiatan yang dilaksanakan terus-menerus secara efektif dan efisien untuk memperbaiki / menyempurnakan Bhakti TNI dalam bentuk dan tipe penyelenggaraan Operasi Bhakti dan Karya Bhakti, guna meningkatkan kepedulian TNI untuk membantu menangani permasalahan sosial serta kemanusiaan baik atas permintaan maupun atas inisiatif sendiri, dalam rangka membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sehingga dapat didayagunakan bagi kepentingan pertahanan negara aspek darat.

Indikator yang kuat sebagai pedoman aparat teritorial dalam menentukan keberhasilan dalam pelaksanaan operasi teritorial di wilayah Papua. Untuk menentukan suatu indikator keberhasilan dalam setiap pelaksanaan operasi, tentunya diperlukan suatu pengawasan yang lebih profesional. Menurut George R. Terry mengemukakan bahwa pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilamana perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar (ukuran).

Berdasarkan teori tersebut, maka indikator keberhasilan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : a. Indikator A (Penetapan Indikator keberhasilan dalam pelaksanaan Operasi Teritorial). Tersedianya suatu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan operasi teritorial yang akan mewujudkan kedamaian di wilayah Papua berdasarkan penilaian aspek-aspek yang mempengaruhi terhadap keberhasilan tersebut. Kemampuan Temu Cepat dan Lapor Cepat, Kemampuan Penguasaan Wilayah, Kemampuan Pembinaan Perlawanan



Rakyat dan Kemampuan Manajemen Teritorial serta Kemampuan Komunikasi Sosial dimana masing-masing kemampuan tersebut memiliki kecakapan, keterampilan dan kesanggupan dimiliki oleh setiap Personel satuan teritorial. Untuk mewujudkan kondisi tersebut dilakukan melalui penetapan Indikator keberhasilan yang dapat tercermin dari hasil kegiatan teritorial di daerah operasi Papua; b. Indikator B (Penyuluhan Hukum). Terciptanya suatu pengawasan masyarakat yang kuat dalam pembinaan masalah penyuluhan kehidupan berbangsa dan bernegara kepada masyarakat sehingga mampu mempengaruhi berkurangnya tingkat Tindakan inkonstitusional. Indikasi dari kuatnya pengawasan masyarakat dalam penyuluhan berbangsa dan bernegara adanya hal-hal yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan serta stabilitas keamanan; c. Indikator C (Sistem Pelaporan Satgas Teritorial). Sistem Pelaporan Satgas Teritorial tersusun secara sistematis dan terstruktur untuk memenuhi unsur kebutuhan data dalam pelaksanaan operasi teritorial. Data-data teritorial sangatlah penting bagi satuan pelaksana kegiatan teritorial, karena pelaksanaan kegiatan teritorial berpedoman pada data-data teritorial yang dimiliki, seperti dalam program ketatalaksanaan pembinaan teritorial, yaitu suatu kegiatan penyusunan administrasi sesuai pentahapannya meliputi pengumpulan data teritorial, analisa kejadian yang dituangkan dalam tabulasi data, membuat rencana pembinaan teritorial dan laporan kegiatan pembinaan teritorial kepada satuan komando atas. Maka data-data teritorial sangatlah penting dan harus selalu diperbaharui dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah. Sistem pengadministrasian merupakan sebuah sistem yang harus dilaksanakan dalam kegiatan teritorial untuk menciptakan suatu data primer maupun sekunder yang didapat di wilayah operasi sehingga dapat dianalisis perkembangannya maupun dijadikan pedoman pada kegiatan operasi teritorial selanjutnya.

Berdasarkan pembahasan diatas, untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan operasi teritorial melalui penetapan Indikator yang kuat melalui pembentukan data indeks pencapaian yang dapat menjadi panduan dalam menentukan indeks pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan teritorial, pembentukan rencana strategis dalam pelaksanaan operasi teritorial secara berkala, penentuan tahapan keberhasilan operasi dalam



pelaksanaan operasi teritorial, melalui : 1) Pembentukan data indeks pencapaian yang dapat menjadi panduan dalam menentukan indeks pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan teritorial; 2) Pembentukan rencana strategis dalam pelaksanaan operasi teritorial secara berkala. Misalnya meningkatkan program kerja sama antar instansi pemerintah, baik di level kementerian maupun pemerintah daerah bersama dengan TNI-Polri, dalam suatu prosedur hubungan kerja yang jelas; 3) Penentuan tahapan keberhasilan operasi dalam pelaksanaan operasi teritorial melalui perumusan tentang penentuan tahap keberhasilan dalam pelaksanaan operasi teritorial di Papua atau membentuk tim pengawasan internal dalam melaksanakan evaluasi pada pencapaian keberhasilan setiap tahapan dalam pelaksanaan operasi teritorial melalui metode pengawasan melekat, sehingga dapat menentukan progress yang dicapai oleh satgas teritorial di Papua.

Apabila dikaitkan dengan penelitian terdahulu yang hampir sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Eka Prabawa tentang “Strategi Komunikasi Antar Budaya TNI di Papua” dan penelitian yang dilakukan oleh Thomas Agung Kurnianto, dkk tentang “Upaya Indonesia Mencegah Konflik Papua dengan Pendekatan Mediasi humanistik”. Artinya kemajemukan masyarakat di Papua merupakan suatu kekayaan dan modal sosial yang sangat baik untuk menjadi Papua sebagai wilayah yang sejajar dengan wilayah-wilayah lain di Indonesia yang lebih dahulu maju. Dengan adanya indikator-indikator operasi teritorial yang dilakukan oleh TNI dapat menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Papua secara humanistik. Hal ini pun sebagai suatu harapan tokoh-tokoh Papua yang diwakili oleh Mantan Bupati Merauke dan Bupati Mappi, di mana tingkat kondusifitas keamanan dan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua merupakan modal sosial untuk memajukan tanah Papua secara umum.

4. Kesimpulan dan Saran.

Operasi teritorial merupakan operasi yang memadukan kemampuan militer dengan kemampuan pembinaan masyarakat, di mana pembinaan dapat dilakukan melalui pelibatan masyarakat itu sendiri untuk meningkatkan keberhasilan operasi, kondisi saat ini adalah



belum kuatnya pelibatan tokoh adat dan tokoh agama, yang mana dalam pelaksanaan selama ini hanya dijadikan objek dalam pelaksanaan operasi belum dijadikan mitra sebagai partner untuk mencapai keberhasilan operasi, maka solusi penting yang harus segera dilaksanakan adalah mewujudkan pelaksanaan operasi teritorial dengan melibatkan tokoh adat dan tokoh agama melalui perwujudan konsep operasi 3 tungku (TNI-Tokoh Adat/Tokoh Agama-Pemda) melalui pembentukan kesadaran untuk cepat lapor kepada pihak yang berwenang apabila terjadi sesuatu yang membahayakan bagi masyarakat dan kepentingan bersama yang ada di daerahnya, pemeliharaan ketentraman dan kerukunan antar suku serta agama di kalangan masyarakat, penggalangan dan pemberian penerangan kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap waspada terhadap adanya berbagai ancaman, dengan metode edukasi, sosialisasi, komunikasi, menggunakan sarana metode Binter, anjangsana, dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam membentuk kondisi juang perlawanan wilayah terhadap kelompok separatis Papua.

Penggunaan strategi yang tepat dalam sebuah operasi merupakan satu kunci penting dalam mencapai keberhasilan operasi, kondisi Papua tidak sama dengan kondisi di daerah lain maka diperlukan suatu strategi khusus yang diterapkan dalam penyelesaian permasalahan di Papua, banyaknya kearifan lokal yang terdapat di wilayah Papua serta belum terbentuknya kesadaran toleransi antar bangsa merupakan permasalahan yang pelik dan menjadikan kontra produktif bagi pelaksanaan operasi teritorial saat ini maka solusi penting yang harus segera dilaksanakan adalah mewujudkan pelaksanaan operasi teritorial melalui penggunaan strategi pendekatan multikultural di wilayah Papua melalui pemanfaatan kearifan lokal dalam penyadaran berbangsa dan bernegara, penggelaran pendidikan multikultural dalam Konteks Keindonesiaan, pendirian kampung-kampung Bhineka Tunggal Ika, dengan metode pendidikan, koordinasi, komunikasi menggunakan sarana program pemerintah daerah, kebudayaan lokal, program kementerian terkait dalam rangka mewujudkan masyarakat Papua yang rukun damai serta toleran antar suku dan agama sebagai penguatan masyarakat dalam masuknya pemikiran paham separatis OPM.



Pelaksanaan operasi teritorial memerlukan suatu arahan dan tujuan yang jelas yang harus diimplementasikan satgas teritorial di lapangan agar memperoleh suatu operasi yang terstruktur dan terarah sehingga memiliki tujuan yang jelas dalam pelaksanaan operasi, kondisi saat ini adalah belum adanya indikator yang jelas dalam penilaian suatu kegiatan operasi teritorial sehingga terkesan berjalan ditempat, maka daripada itu solusi yang harus segera dilaksanakan adalah mewujudkan keberhasilan pelaksanaan operasi teritorial melalui penetapan Indikator yang kuat melalui pembentukan data indeks pencapaian yang dapat menjadi panduan dalam menentukan indeks pencapaian keberhasilan pelaksanaan kegiatan teritorial, pembentukan rencana strategis dalam pelaksanaan operasi teritorial secara berkala, penentuan tahapan keberhasilan operasi dalam pelaksanaan operasi teritorial dengan metode edukasi, sosialisasi, koordinasi menggunakan sarana data laporan hasil operasi, protap / instop satgas teritorial, dalam rangka mewujudkan suatu operasi teritorial yang terstruktur dan terarah dalam mencapai tujuan operasi teritorial.

Daftar Pustaka

BUKU-BUKU dan Jurnal

Analisa Potensi Pertahanan (Anpothan) Kodam XVII/Cenderawasih TA. 2022

Analisa Potensi Wilayah (Anpotwil) Kodam XVII/cenderawasih TA. 2022.

Ariani, Dorothea Wahyu. 2004. "Pengendalian Kualitas Statistik". (Yogyakarta: Penerbit Andi)

Analisa Daerah Operasi (ADO) Kodam XVII/Cenderawasih TA. 2022

Bambang Darmono, Konsep dan Sistem Keamanan Nasional Indonesia (Yogyakarta : Jurnal Ketahanan Nasional: No. XV (1) April 2010)

Buku Petunjuk Teknik tentang Sisrendal Binter, Surat Keputusan Nomor : Skep/507/XII/2003

Creswell, John. W. (2009). Research Design : Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed, Pustaka Pelajar.

Djajasudarma. T Fatimah "Penalaran Deduktif-Induktif dalam wacana Bahasa Indonesia" (Alqaprint Jatinangor, 1999)



- E. Robert Goodin, *The Real Worlds of Welfare Capitalism*, dalam: H. Satria Azizy, *Mendudukan Kembali Makna Kesejahteraan Dalam Islam*, (Ponorogo: Centre for Islamic and Occidental Studies (CIOS), 2015
- George R. Terry, *Principles of Management*. Publish Richard D. Irwin from The University of California, 1956
- Gunawan, Imam. *METODE PENELITIAN KUALITATIF.: Teori dan Praktik* Jakarta: PT Bumi Aksara. 2013
- Halkis, Mhd, 2020, *The Implementation of Penta Helix Counterinsurgency (COIN) Strategic Model in Reconstructing Special Autonomy for Papua*, *Journal Society*, Vol 8 No 1 (2020), Published June 30, 2020, DOI:<https://doi.org/10.33019/society.v8i1.182>
- Moleong, Lexy J, (2006). *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya.
- Oman Sukmana, "Konsep dan Desain Negara Kesejahteraan (Welfare State)", *Jurnal Sospol*, Vol 2 No.1 (2016)
- Petunjuk Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih TA. 2022
- Rencana Pembinaan Teritorial Kodam XVII/Cenderawasih TA. 2022
- Rencana Kontijensi (Rentikon Kotamaops) Kodam XVII/Cenderawasih TA. 2022.
- Sugiyono, (2006). *Metode penelitian Kualitatif*, Alfabeta Cetakan Pertama
- Sugiyono, (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta Cetakan Keempat
- Telaahan Binter Kodam XVII/Cenderawasih TA. 2022

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang POLRI
- Undang-undang RI no. 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan negara
- Undang-undang RI No 34 Tahun 2004 Tentang TNI
- Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM



Inpres Nomor 9 tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

Keppres Nomor 20 tahun 2020 Tim Koordinasi Terpadu Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat

INTERNET

Andrean W Finaka "Penyebab KLB Campak dan Gizi Buruk di Asmat" Online di : <https://indonesiabaik.id/infografis/penyebab-klb-campak-dan-gizi-buruk-di-asmat> (diakses pada 20 Sept 2022)

BPHN, naskah akademik ruu tentang pemberantasan tindak pidana separatis" Online di : https://bphn.go.id/data/documents/naskah_akademik_ruu_tentang_pemberantasan_tindak_pidana_teroris

BPS, 2022. Indeks Pembangunan Manusia, diakses melalui <https://www.bps.go.id/subject/26/indeks-pembangunan-manusia.html>

BPS, 2022 Tingkat Partisipasi Sekolah Usia 7-24 tahun di Papua mencapai 60%, diakses melalui <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/14/tingkat-partisipasi-sekolah-usia-7-24-tahun-di-papua-hanya-60>

CNN Indonesia "Bentrok Suku Nduga dan Lani Jaya di Papua, Kedua Pihak Berdamai" Online di : <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220116072405-20-747175/> (diakses pada 20 Sept 2022)

Emir Yanwardhana "Kronologi Vanuatu Serang RI di PBB & Sebut-sebut Papua" Online di : <https://www.cnbcindonesia.com/news/> (diakses pada 20 Sept 2022)

INews "Jumlah Kodim di Papua Kurang, Jenderal Andika Perkasa: Idealnya ada 30" online di : <https://papua.inews.id> (diakses pada 08 September 2022)

KSP Blak-blakan Ulah KKB di Papua Sejak 2022, 13 korban meninggal dunia, online di : <https://news.detik.com/berita/d-5970405/ksp-blak-blakan-ulah-kkb-di-papua-sejak-2022-13-korban-meninggal-dunia> (diakses pada 12 Januari 2023)



Detik-detik KKB Tembaki Polres Yahukimo dan Pos Brimob, online di <https://news.detik.com/berita/d-6491110/detik-detik-kkb-tembaki-polres-yahukimo-dan-pos-brimob> (diakses pada 12 Januari 2023)

Musa Abubar "Balai Bahasa catat 414 Bahasa daerah Papua" Online di : <https://www.antaraneews.com/berita/1155900/balai-bahasa-catat-414-bahasa-daerah-papua> (diakses pada 20 Sept 2022)

Nur Habibie "Sadisnya Pemberontak di Papua Habisi 19 Pekerja PT Istaka Karya" Online di : <https://m.merdeka.com/peristiwa/sadisnya-pemberontak-di-papua-habisi-19-pekerja-pt-istaka-karya.html> (diakses pada 20 Sept 2022)